

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN
BERMASALAH DAN INFLASI TERHADAP PEMBERIAN
PEMBIAYAAN SEKTOR AGRARIS PADA BPRS DI INDONESIA**
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Jurusan S1 Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

PUSPITANINGTYAS SARI HADIYATI

NIM: 1505036100

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2019**

Muchlis, Dr., M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002

Perum Mangkang Indah RT. 11 / RW. 02 No. 407 kelurahan Wonosari
Kecamatan Ngaliyan.

Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004

Sukodono Rt 01/Rw 04 Kec. Bonang Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Puspitaningtyas Sari Hadiyati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Puspitaningtyas Sari Hadiyati

Nomor Induk : 1505036100

Judul : **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN
BERMASALAH DAN INFLASI TERHADAP PEMBERIAN
PEMBIAYAAN SEKTOR AGRARIS PADA BPRS DI INDONESIA.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

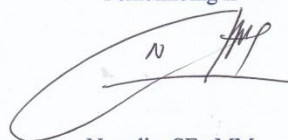


Muchlis, Dr., M.Si.

NIP. 19610117 198803 1 002

Semarang, 11 Desember 2019

Pembimbing II



Nurudin, SE., MM

NIP. 19900523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : **Puspitaningtyas Sari Hadiyati**
NIM : 1505036100
Judul : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Inflasi Terhadap Pemberian Pembiayaan Sektor Agraris Pada BPRS di Indonesia**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan Lulus pada tanggal : **20 Desember 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1, tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 20 Desember 2019

Ketua Sidang

Drs. SAEKKHU, M.H.
NIP. 196901201994031004

Penguji Utama I

Dr. RATNO AGRIYANTO, CA., CPA.
NIP. 198001282008011010

Pembimbing I

Dr. MUHLIS, M.Si.
NIP.196101171988031002

Sekretaris Sidang

Dr. MUHLIS, M.Si.
NIP.196101171988031002

Penguji Utama II

H. KHOIRUL ANWAR, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Pembimbing II

NURUDIN, S.E., M.M
NIP. 199005232015031004



MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman baik maka Allah akan melipat gandakan untuknya, dan baginya pahala yang mulia

(QS. Al Hadid: 11)

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ لَا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ قُلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

(QS. Al Mujadalah: 11)

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2019

Deklarator,



Puspitaningtyas Sari Hadiyati
1505036100

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil'Alamin. Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu tercurahkan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Hadi Amroh dan Ibu Siti Ukendaryati yang selalu mendoakan, memotivasi, memberi saran dan nasehat, menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.
2. Ketiga kakak Siti Noviyatul Marfu'ah, Rizal Noor Ramadhan dan Budi Wahono yang selalu memberikan mendengarkan keluhan kesah, memberikan saran, dan motivasi. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ-و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas

			atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ : syai'un

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aufu al-kaila wa al-mîzāna

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keuangan syariah dengan cepat, mudah dan sederhana. Salah satu kegiatan usaha BPRS adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan terutama pembiayaan pada sektor riil yang diharapkan dapat menunjang perekonomian negara yaitu Pembiayaan sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian atau Sektor Agraris. Penyaluran pembiayaan BPRS selalu meningkat dari tahun ketahun, namun penyaluran pembiayaan sektor agraris mengalami penurunan dan terbilang masih rendah dibanding pembiayaan sektor lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan sektor agraris pada BPRS di Indonesia. Data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan periode pengamatan Juli 2016 – Juni 2019 dengan teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan sektor Agraris dengan t hitung $-0,442$ dan nilai signifikansi sebesar $0,662$. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan sektor Agraris dengan t hitung $5,797$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000$. Variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan sektor Agraris dengan nilai t hitung $2,219$ dan nilai signifikansi sebesar $0,034$.

Kata kunci: BPRS, Pembiayaan, dan Sektor Agraris.

ABSTRACT

Sharia Rural Bank (BPRS) makes it easy for people who want to get sharia financial services quickly, easily and simply. One of the BPRS business activities is the distribution of funds in the form of financing, especially financing in the real sector which is expected to support the country's economy, namely the Agriculture, Forestry and Agricultural Facilities Financing or the Agriculture Sector. Distribution of BPRS financing has always increased from year to year, but the distribution of financing in the agricultural sector has decreased and still relatively low compared to financing other sectors.

This study aims to analyze and explain the factors that influence the distribution of agrarian sector financing to BPRS in Indonesia. The data used in this study are secondary data with an observation period July 2016 - June 2019 with data analysis techniques using multiple linear regression methods.

The results of this study indicate that the Third Party Funds variable has a insignificant negative effect on the financing of the Agricultural sector with a t count of -0.444 and a significance value of 0.662. Non Performing Financing (NPF) variable has a significant positive effect on the financing of the Agricultural sector with a t count of 5,797 and a significance value of 0,000. Inflation variable has a significant positive effect on the financing of the Agricultural sector with a t count of 2,219 and a significance value of 0.034.

Keywords: BPRS, Financing, and Agriculture sector

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta nikmat yang Allah SWT berikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Inflasi Terhadap Pemberian Pembiayaan Sektor Agraris pada BPRS di Indonesia”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si, selaku Ketua Prodi dan Ibu Muyassarah S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. Muchlis, M.Si, selaku Dosen Wali studi sekaligus Pembimbing I
5. Bapak Nurudin SE., MM, selaku Pembimbing II.
6. Seluruh dosen, staf serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh keluarga tercinta, Bapak Hadi Amroh dan Ibu Siti Ukendaryati yang selalu memberikan doa, nasehat, motivasi, cinta dan kasih sayang selama menempuh study di UIN Walisongo dan ketiga kakaku Siti Noviyatul Marfu'ah, Rizal Noor Ramadhan dan Budi Wahono yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
8. Teman-teman kelas S1 Perbankan Syariah C 2015, terimakasih atas empat tahun kebersamaan yang telah kita lewati bersama
9. Teman-teman Ma'had Walisongo, terimakasih telah mengajarkan banyak ilmu, dan menjadi keluarga satu asrama, semoga tali silaturahmi atap terjaga.
10. Teman-teman KKN posko 97 desa Undaan Lor, terimakasih telah menjadi keluarga satu atap selama 45 hari
11. Seluruh sahabat, teman dan saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih telah menemani dan berbagi keluh kesah, suka dan duka serta terus memberikan doa, saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan lindungan-Nya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa-doanya kepada penulis. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Semarang, 11 Desember 2019

Puspitaningtyas Sari Hadiyati
NIM: 1505026100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR GRAFIK	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan.....	11
1.4. Manfaat.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15

2.1.	Landasan Teori	15
2.1.1.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	15
2.1.2.	Pembiayaan.....	19
2.1.3.	Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	30
2.1.3.1.	Dana Pihak Ketiga.....	30
2.1.3.2.	Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing</i>)	
2.1.3.3.	Inflasi	44
2.2.	Kerangka Berpikir	56
2.3.	Hipotesis	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		59
3.1.	Metode Penelitian yang Digunakan.....	59
3.2.	Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	60
3.3.	Populasi dan Sampel.....	63
3.4.	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	64
3.5.	Teknik Analisis Data	65
3.5.1.	Uji Asumsi Klasik.....	65
3.5.2.	Analisis Regresi Berganda.....	68
3.5.3.	Uji Hipotesis	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		73
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	73
4.2.	Analisis Data	76
4.2.1.	Uji Asumsi Klasik.....	76
4.2.2.	Analisis Regresi Berganda.....	80
4.2.3.	Uji Hipotesis	82

4.3. Pembahasan	86
PENUTUP.....	92
5.1. Kesimpulan.....	92
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan pada BPRS	3
Tabel 1.2 Alokasi Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Sektor Ekonomi	4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian NPF	40
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator	62
Tabel 3.2 Pengukuran Autokorelasi	67
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov	78
Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)	80
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda).....	81
Tabel 4.5 Uji Koefisian Determinasi.....	83
Tabel 4.6 Uji Simultan (F)	83
Tabel 4.7 Uji Parsial (t)	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	57
Gambar 4.1 Uji Normalitas (P-P Plot)	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Rata-rata proporsi NPF	89
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Jumlah Dana Pihak Ketiga, NPF, Inflasi dan
Pembiayaan Sektor Agraris Juli 2016 – Juni 2019

Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 3 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Lampiran 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Lampiran 7 Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

Lampiran 8 Hasil Parsial (Uji Statistik t)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Tercatat ditahun 2017 sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 31,86% dan 30,46% ditahun 2018 dari total tenaga kerja.¹ Selain itu sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Tercatat, Produk Domestik Bruto pada sektor pertanian sebesar 13,14% pada tahun 2017 dan 13,53% pada tahun 2018.² Potensi pada sektor pertanian pun cukup besar dan sangat strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Seperti letak geografis negara Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Kondisi iklim ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, selain itu kondisi tanah atau lahan yang subur cocok untuk perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Dengan semua potensi kekayaan alam yang dimiliki, tidak heran apabila sektor pertanian menjadi andalan sumber penerimaan devisa.

Selain berperan sebagai penyumbang PDB, penyedia lapangan pekerjaan dan sumber devisa negara, Sektor pertanian juga

¹ Badan Pusat Statistik, *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2018*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2018

² Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto atas dasar Harga Barang Berlaku menurut Lapangan Usaha 200-2018*. Diakses pada tanggal 11 Desember 2018

berperan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sandang dan papan, juga sebagai pilar pengembangan kegiatan ekonomi di pedesaan dengan dikembangkan menjadi usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan atau agroindustri. Disisi lain sektor pertanian juga berkontribusi terhadap produktivitas pada sektor-sektor lain seperti pada sektor manufaktur sebagai penyuplai bahan baku dan pada sektor perdagangan.

Dalam pengelolaan produksi pada sektor pertanian, faktor produksi harus dikelola dengan baik, agar output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu tanah atau lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Sebagai lembaga keuangan, Perbankan berkontribusi dalam penyaluran modal atau dana yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti pada kegiatan pengelolaan padi yang mengarah pada produksi maksimum akan meningkatkan kebutuhan pada pupuk, obat-obatan, benih unggul,³ serta teknologi sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang proses produksi. Untuk itu, dibutuhkan modal atau dana yang cukup agar produksi mencapai target maksimum, disinilah lembaga keuangan khususnya perbankan berperan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaannya.

Perbankan Syariah menjadi alternatif dalam bermuamalah dengan menghindari sistem *riba* yang diharamkan dalam Islam. Dengan prinsip tidak mengandung unsur *riba*, *maisir* (perjudian),

³ Hasan Basiri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 4

gharar (ketidakpastian) dan *zalim* (tidak adil) yang diterapkan dalam segala kegiatan usahanya menjadi pembeda perbankan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yang lain. Kelembagaan perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga macam yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adanya BPRS, memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keuangan syariah dengan cepat, mudah dan sederhana namun belum terjangkau BUS atau UUS.

Bila dilihat dari data statistik perbankan syariah tahun 2015-2018 perkembangan penyaluran pembiayaan pada BPRS meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkembangan pembiayaan pada BPRS

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan pada BPRS

Tahun	Pembiayaan BPRS (dalam jutaan rupiah)	Perubahan presentase pembiayaan (%)
2015	5.767.171	-
2016	6.662.556	15,53
2017	7.763.951	16,53
2018	9.084.467	17,01

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Pembiayaan pada BPRS dari tahun ke tahun terus meningkat, dari segi nominal maupun perubahan persentasenya, ini menunjukkan bahwa tren pembiayaan pada BPRS dari tahun ke

tahun adalah positif. Perkembangan penyaluran pembiayaan pada BPRS yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini tidak sebanding dengan perkembangan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian. Padahal sektor pertanian berperan dalam perekonomian nasional, tetapi penyaluran pembiayaan pada sektor ini dari tahun ke tahun terus menurun dibanding sektor ekonomi yang lain. Berikut alokasi pembiayaan sektor ekonomi pada BPRS di Indonesia.

Tabel 1.2
Alokasi Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Sektor Ekonomi
Dalam presentase

No	Sektor Ekonomi	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian	5,50%	4,65%	4,12%
2.	Pertambangan	0,11%	0,23%	0,22%
3.	Perindustrian	0,87%	0,94%	1,32%
4.	Listrik, Gas dan Air	0,16%	0,16%	0,14%
5.	Konstruksi	6,90%	7,62%	7,65%
6.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	24,78%	22,69%	22,37%
7.	Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1,39%	1,16%	1,14%

8.	Jasa Dunia Usaha	8,80%	7,22%	6,81%
9.	Jasa sosial/Masyarakat	9,48%	9,25%	8,47%
10.	Lain-lain	42,02%	46,07%	47,76%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Dari tabel tersebut kita ketahui bahwa penyaluran pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian selama tahun 2016 hingga 2018 menempati urutan ke enam dari total pembiayaan yang diberikan, setelah sektor lain-lain; sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor jasa sosial/masyarakat; sektor jasa dunia usaha; dan sektor konstruksi. Selain itu dari tahun ke tahun penyaluran pembiayaan pada sektor ini terus mengalami penurunan.

Memang dari semua pembiayaan yang disalurkan BPRS, pembiayaan yang dinilai paling berisiko adalah pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian. Dikarenakan pembiayaan yang bertujuan membantu para petani dalam masalah permodalan dan pengadaan alat-alat pertanian untuk menunjang usaha ini memiliki risiko yang cukup tinggi, yaitu ancaman gagal panen karena serangan hama penyakit maupun gagal panen yang disebabkan karena cuaca yang berubah-ubah serta hasil pertanian yang tidak tahan lama. Meskipun begitu BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang lokasinya dekat dengan pedesaan, diharapkan berkontribusi dan menunjang perekonomian di pedesaan. Contohnya pada BPRS Artha Mas Abadi yang ada di Kabupaten Pati yang

melayani pembiayaan sektor agraris dengan produk iB *Musarakah*.⁴ Selain itu di ada BPRS Amanah Rabbaniyah yang terletak di Kabupaten Bandung yang menyalurkan pembiayaannya disektor pertanian⁵ dan masih banyak lagi. Pembiayaan sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian ini diaplikasikan ke dalam berbagai akad sesuai dengan kebutuhan dan kriteria pembiayaannya. Ditambah lagi, penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian ini juga dipengaruhi beberapa faktor internal dari BPRS ataupun eksternal yang mempengaruhi keputusan dalam penyaluran pembiayaan.

Hal ini juga dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Winda Nur Aprianti variabel SBIS, SBI, Equivalent Rate, dan *Equivalent Rate* Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada jangka panjang. Sedangkan jumlah DPK dan suku bunga bank konvensional berpengaruh secara negatif signifikan. Sedangkan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan NPF tidak mempengaruhi pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.

⁴ <https://bprsama.wordpress.com/pembiayaan-al-musarakah/>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019

⁵ <https://bprsar.co.id/> Diakses pada tanggal 25 Maret 2018

Sementara itu, penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Indah Khoirun Nisa menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan adalah ROA dan DPK, sedangkan NPF, CAR, dan Inflasi berpengaruh secara positif tidak signifikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin yang dilakukan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa Inflasi dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sementara NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian lain yang dilakukan Akbar Nur Pribadi mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BPRS di Indonesia menyatakan bahwa jumlah DPK, rasio pembiayaan UKM dan FDR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS. Sedangkan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun variabel ROA, ROE dan suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS.

Beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Indah Khoirun Nisa dan Akbar Nur Pribadi yang menyatakan bahwa jumlah DPK berpengaruh secara positif dan signifikan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Winda Nur Aprianti jumlah DPK berpengaruh secara negatif dan signifikan.

Lain lagi pada variabel NPF, pada penelitian yang dilakukan Irfan Syauiqi Beik dan Winda Nur Aprianti menyatakan bahwa NPF berpengaruh secara positif namun tidak signifikan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar Nur Pribadi yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan.

Pada variabel Inflasi, penelitian yang dilakukan oleh Indah Khoirun Nisa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauiqi Beik dan Winda Nur Aprianti yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin, Inflasi berpengaruh positif dan signifikan.

Beberapa hasil penelitian tersebut, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan Inflasi dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena memiliki banyak perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan yang lain.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha dengan menggunakan instrumen produk simpanan yaitu: giro, deposito dan tabungan⁶, namun dalam penghimpunan dana pada BPRS hanya tersedia simpanan berupa tabungan dan deposito. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya

⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 140

dalam menghimpun dana masyarakat.⁷ DPK memiliki peran terbesar dalam kontribusi sumber dana bank. Sehingga jumlah DPK yang berhasil dihimpun akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit/pembiayaannya.⁸

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan menimbulkan banyak masalah bahkan dapat menyebabkan ambruknya bank syariah.⁹ Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financinag* (NPF) adalah kredit/pembiayaan yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, kredit dengan kualitas diragukan dan kredit macet atau yang biasa disebut *baddebt*.¹⁰ Hal ini dapat mempengaruhi keputusan dalam penyaluran pembiayaan pada masyarakat, karena banyaknya kerugian yang harus ditanggung.

Pada hakikatnya, penilaian kualitas pembiayaan didasarkan atas risiko kemungkinan, menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-

⁷ Wahyu Syarvina, “Peranan Dana ihak Ketiga Dalam Kegiatan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Pada Bank Syariah” At-Tawassuth, Vol. III, No 1, 2018, hlm. 557

⁸ Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 64

⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 99

¹⁰ Irham Fahmi, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: PT. Alimni, 2008), hlm. 13

kewajiban untuk melunasi pembiayaan.¹¹ NPF menjadi penilaian kesehatan bank dalam mengelola pembiayaannya.

Inflasi secara umum berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter terhadap suatu komoditas. Definisi Inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.¹² Meningkatnya inflasi mempengaruhi minat menabung masyarakat yang semakin rendah dan sebaliknya akan meningkatkan minat konsumsi masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa alokasi pembiayaan pada sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sedangkan penyaluran pembiayaan pada BPRS selalu meningkat. Selain itu, terdapat research GAP dari penelitian sebelumnya mengenai pemberian pembiayaan terhadap sektor agraris, menjadi alasan penting untuk diteliti dan dibahas.

¹¹ Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 742

¹² Adiwarmn A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.135

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka penulis merumuskan batasan masalah

1. Apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia?
2. Apakah NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia?
3. Apakah Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia?

1.3. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi Perbankan

Memberikan evaluasi atas penyaluran pembiayaan sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian pada BPRS deluruh Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ada tidaknya pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris pada BPRS seluruh Indonesia.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh DPK, NPF dan Inflasi dalam pemberian pembiayaan sektor produktif. Serta untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari empat sub bab diantaranya latar belakang masalah yang menguraikan latar belakang masalah, memaparkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, rumusan masalah dipaparkan untuk memperjelas arah penelitian dan memberi batasan penelitian. dan tujuan penelitian yang menjabarkan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat.

Bab II Landasan Teori

Memaparkan teori-teori yang mendasari masalah penelitian antara lain mengenai BPRS, pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, alokasi pembiayaan dan jenis pembiayaan beserta variabel yang mempengaruhi pembiayaan yaitu, DPK, NPF dan Inflasi. Bab ini juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Berisi mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, menjelaskan pula tentang metode pengumpulan dan serta teknik penelitian yang digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisi mengenai pembahasan dari hasil pengolahan data yang selanjutnya dianalisis untuk membuktikan hipotesis dan dipaparkan hasilnya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan adalah lembaga yang menghubungkan masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, hal ini bertujuan untuk mengefektifkan dana yang tersimpan dengan disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan mampu untuk mengelolanya.¹³

Di Indonesia sistem perbankan dijalankan dengan dua sistem, yang pertama perbankan konvensional, yang masih menguasai pasar perbankan di Indonesia dan yang kedua perbankan syariah yang dalam kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan acuan al-Qur'an dan hadits. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem bunga yang ada di perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah.

Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:¹⁴

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) yang dalam kegiatan usahanya setara dengan bank umum konvensional,

¹³ Irham Fahmi, op.cit hlm. 49

¹⁴ Veithzal Rifai & Arviyan Arifin, op.cit hlm 165

bedanya BUS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. BUS juga dapat dikelompokkan menjadi Bank Devisa dan Bank Non Devisa.

- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dikantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Sebagai unit kerja khusus, UUS memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang pembantu syariah, melaksanakan pengawasan dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang pembantu syariah, menyusun laporan keuangan dari seluruh kantor cabang pembantu syariah, dan melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.
- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan BPR Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah, memaparkan bahwa keberadaan BPRS untuk memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro yang belum terjangkau layanan bank umum syariah.

BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jasa bank yang tidak boleh dijalankan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.¹⁵

BPRS dituntut agar dapat menyalurkan dana untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat dan mampu memberika layanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 44

Perbankan Syariah pasal 21 bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 2. Investasi berupa deposito atau tabungan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 2. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*.
 3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*.
 5. Pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi

- berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah;
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

2.1.2. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘Saya Percaya’ atau ‘Saya Menaruh Kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁶

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 1

hidup perbankan syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang kurang baik akan menimbulkan banyak masalah dan kerugian yang dialami bank.¹⁷

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atas tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbal hasil atau bagi hasil.¹⁸

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Adapun dasar hukum mengenai pembiayaan terdapat pada surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

¹⁷ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, loc.cit.

¹⁸ Edi Susilo, *analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jepara: UNISNUPRESS, 2017), hlm. 109

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap dan sebagainya.¹⁹

Perbankan tidak hanya menjalankan fungsi menghimpun dana, namun sebagai tempat masyarakat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif.²⁰

2. Peran Pembiayaan

Pembiayaan berperan penting dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan. Secara garis besar fungsi pembiayaan diantaranya:²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 145

²⁰ Veithzal Rifai & Arviyan Arifin, *op.cit* hlm. 221

²¹ Veithzal Rifai & Arviyan Arifin, *op.cit* hlm. 712

1. Dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang.
2. Meningkatkan daya guna suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkkn gairah usaha masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
6. Pembiayaan sebagai jembatan utnuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Pembiayaan sebagai alat hubung ekonomi internasional.

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Perbankan syariah mengalokasikan pembiayaanya berdasarkan beberapa prinsip pembiayaan sebagai berikut, yaitu:²²

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
 1. Pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Yaitu perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan berdasarkan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.
 2. Pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah perjanjian antara dua pihak pemilik dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dengan pembagian

²² Veithzal Rifai & Arviyan Arifin, op.cit hlm. 687

bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli.
 1. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana harga jual bank kepada nasabah adalah harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
 2. Pembiayaan dengan akad *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-/syarat tertentu dan pembayaran dilakukan diawal perjanjian.
 3. Pembiayaan dengan akad *istishna'* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati.
- c. Pembiayaan perdasarkan prinsip sewa
 1. Pembiayaan akad *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 2. Pembiayaan dengan akad *ijarah muntahiya bitamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diikuti pemindahan kepemilikan barang diakhir masa sewa.

- d. Pembiayaan berdasarkan jasa dengan akad *qardh*. Dimana nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman.

4. Jenis Pembiayaan

Selain mengelompokkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, BPRS juga mengelompokkan pembiayaan ke beberapa jenis seperti:

- a. Pembiayaan berdasarkan jenis tujuan penggunaan, yaitu untuk modal kerja, investasi dan konsumsi.
- b. Pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan yaitu usaha kecil dan menengah; dan selain usaha kecil dan menengah.
- c. Pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi yaitu:
 - 1. Sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian;
 - 2. Sektor pertambangan;
 - 3. Sektor perindustrian;
 - 4. Sektor listrik, air dan gas;
 - 5. Sektor konstruksi;
 - 6. Sektor perdagangan, restoran dan hotel;
 - 7. Sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi;
 - 8. Sektor jasa dunia usaha;
 - 9. Sektor jasa sosial;
 - 10. Sektor lain lain.

Pembiayaan sektor ekonomi khususnya sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian termasuk pembiayaan berisiko tinggi. Namun dibalik risiko itu sektor yang tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pertanian, kehutanan dan sarana pertanian ini memiliki prospek yang baik, mengingat bahwa sektor pertanian mampu menunjang perekonomian Indonesia.

Menjadi tantangan BPRS untuk menyediakan desain pembiayaan yang sesuai dengan sektor yang disebut agraris ini. Seringkali desain pembiayaan sektor agraris ini sering menggunakan desain pembiayaan non agraris. Sehingga perhitungan usaha pada sektor non agraris (terutama industri dan jasa) jika diterapkan untuk usaha agribisnis akan cenderung *over estimate*. Maka perlu desain pembiayaan yang sesuai untuk sektor ini.²³

5. Desain Pembiayaan untuk Pembiayaan Sektor Agraris

Desain pembiayaan yang dapat diterapkan BPRS untuk sektor agraris ini antara lain:²⁴

1. Mudharabah

Mudharabah (Trust Financing/Trust Investment) merupakan kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai penyedia modal sedangkan pihak

²³ Ashari & Saptana, “*Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*” Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23, No 2, 2015, hlm. 133

²⁴ Ibid. Hal 138

kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang ada dalam kontrak. Risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pengelola seperti penyelewengan penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lainnya. Implementasi *mudharabah* di sektor pertanian dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Banyak BPRS yang menggunakan desain pembiayaan ini untuk penyaluran pembiayaan sektor pertanian, namun risiko dari sektor pertanian yang tinggi kurang cocok untuk digunakan. Apabila terjadi gagal panen maka bukan hal tidak mungkin BPRS juga akan mengalami kerugian.

2. *Musyarakah*

Musyarakah (Partnership/Project Financing Participation) merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Banyak jenis usaha yang dapat dibiayai dengan *musyarakah* salah satunya kegiatan usaha agribisnis dengan jenis usaha yang luas sangat memungkinkan memakai desain pembiayaan *musyarakah* ini.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah (*Harvest-yield profit sharing*) merupakan kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam *muzara'ah*, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan jika benih berasal dari penggarap disebut *mukhabarah*. Desain pembiayaan *muzara'ah* ini sudah sangat populer di kalangan petani dengan istilah saka-menyakap. Sistem saka yang berlaku di Jawa umumnya *maro* (1/2) di mana hasil dan biaya saprodi dibagi dua. Pada sistem *maro* di luar Jawa, hasil dibagi dua dan biaya saprodi menjadi tanggungan pemilik lahan.

Bervarisainya sistem bagi hasil di pedesaan baik di Jawa maupun luar Jawa dipengaruhi beberapa faktor: (1) Kelas lahan, yang menunjukkan jarak lahan terhadap jalan utama. Semakin dekat dengan jalan utama, bagian yang diterima pemilik lahan semakin besar dan sebaliknya; (2) Kesuburan lahan yang dilihat dari tipe irigasi. Semakin subur lahan atau semakin baik sistem irigasinya, maka bagian pemilik lahan semakin besar; (3) Tingkat ketersediaan/kelangkaan lahan. Semakin melimpah lahan, maka bagian yang diterima pemilik

lahan semakin kecil; (4) Tingkat ketersediaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang relatif melimpah akan semakin mengurangi bagian penggarap; dan yang terakhir (5) Hubungan antara pasar lahan dan tenaga kerja berpengaruh terhadap sistem sakah-menyakap.

4. *Bai' Al Murabahah*

Bai' Al Murabahah (differed payment sale) merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi contohnya pengadaan barang modal: mesin dan peralatan pertanian.

5. *Bai' As Salam*

Bai' As Salam (in front payment sale) merupakan jual beli dengan ketentuan pembayar dilakukan diawal sedangkan barang diterima dimasa mendatang. *Bai' as salam* mensyaratkan harus jelas kuantitas, kualitas barang serta waktu pembayarannya. Sebagai gambaran aplikasi desain pembiayaan *bai' as salam* untuk sektor pertanian perbankan syariah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah seperti yang dijalankan Bulog, dapat mengadopsi desain *bai' as salam* ini.

6. *Bai' Al Istishna'*

Bai' Al Istishna' (*purchase by order or manufactured*) merupakan fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. Dalam *bai' al istishna'*, ada kontrak antara pembeli dan pembuat barang, dimana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli yang sistem pembayarannya disepakati bersama, dibayar kontan, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa mendatang.

7. *Ar Rahn*

Ar Rahn (mortgage) adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam hubungannya dengan bidang pertanian, praktek gadai/*rahn* sudah umum dijumpai di pedesaan. Perkembangan sistem gadai saat ini memang mulai jarang ditemukan di pedesaan Jawa, namun masih relatif banyak ditemukan di Luar Jawa. Dari banyak kasus dapat ditemukan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya pergeseran sistem gadai kearah sistem bagi hasil dan akhirnya beralih ke sistem sewa lahan.

2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

2.1.3.1. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kegiatan usaha bisnis yang paling utama dalam BPRS. Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus berjalan secara seimbang. Maka untuk dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal, BPRS harus bisa menghimpun dana sebanyak mungkin. Penghimpunan dana pada BPRS yang paling utama adalah melalui dana masyarakat atau dana pihak ketiga.

Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²⁵ Menurut peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah atau valuta asing.

Menurut Kasmir, dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan

²⁵ UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 20

giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.²⁶ Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.²⁷

Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana tersebut dihimpun oleh BPRS dengan produk-produk simpanan yaitu: giro, deposito dan tabungan.²⁸

DPK ini menjadi sumber dana terbesar bagi BPRS dan yang paling diandalkan. DPK sangat berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan. “semakin banyak DPK yang dapat dihimpun bank, maka semakin besar pula tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2006), hal 64

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 165

²⁸ Mudrajad Kuncoro & Suhardjono, loc.cit

masyarakat” dengan demikian maka laba yang akan diperoleh juga meningkat.²⁹

2. Produk Penghimpunan Dana pada BPRS

Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, BPRS memiliki beberapa produk penghimpunan dana yaitu:

1) Simpanan Tabungan

Berdasarkan pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadiah*/investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah³⁰

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mud*

harabah dan *wadiah*. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu, Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*

2) Simpanan Deposito

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya

²⁹ Endang Nurjaya, *Analisis Pengaruh Inflasi SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007 – Maret 2011)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 65

³⁰ Pasal 1 Nomor 21 Undang Undang No.21 Tahun 2008

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.³¹ Prinsip simpanan deposito menggunakan akad *mudharabah*. Dalam akad penghimpunan dana, bank syariah berperan sebagai *mudharib* atau pengelola dana dan nasabah sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana. Dalam hal ini bagi hasil antara bank dengan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan bank.

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Sektor Agraris

Sumber dana yang paling besar dihimpun oleh bank adalah dana pihak ketiga. Dana-dana dari masyarakat ini dapat mencapai 80% dari total dana yang dikelola oleh bank. Jumlah DPK yang berhasil dihimpun akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit/pembiayaannya³² yang kemudian akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank atas penyaluran pembiayaan yang diberikan.

Menurut Wulan Lestari dkk, dalam konsepsi manajemen kredit/pembiayaan, dana pihak ketiga merupakan basis keputusan atau kebijakan dalam bank.

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 102

³² Kasmir, *Managemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.

Apabila DPK dalam keadaan stabil, maka hal ini akan memberikan tingkat kepastian keputusan dalam pemberian kredit. Karena semakin besarnya DPK maka keputusan pemberan kredit akan semakin tinggi pula. DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Ketika dana-dana yang terkumpul dari masyarakat meningkat, maka keputusan untuk menyalurkan kredit juga semakin meningkat.³³ Dengan demikian semakin banyak DPK yang dapat dihimpun bank, maka semakin besar pula tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.³⁴

Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari (2018) bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan pada setor pertanian dengan nilai koefisien β sebesar 0,0238 dengan probabilitas t-statistik sebesar 0,016.³⁵ Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Indah Khoirun Nisa (2014) mengenai pengaruh DPK terhadap

³³ Maltuf Fitri, *Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal Economica, Volume VII/Edisi 1/ Mei 2016. Hal. 74

³⁴ Endang Nurjaya, loc.cit

³⁵ Sri Lestari, *Analisis Pengaruh dan Fungsi Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia (2014-2016)*, (Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). Hal 5

pembiayaan pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan.³⁶

H1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris pada BPRS di Indonesia

2.1.3.2. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat pada perbankan, dimana bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Pembiayaan bermasalah ini timbul karena terjadi kemacetan pembiayaan yang disebabkan berbagai faktor seperti faktor kemampuan nasabah, moral hazard, sampai faktor eksternal seperti krisis ekonomi.³⁷

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian kemampuan kendali³⁸

³⁶ Indah Khoirun Nisa, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 91

³⁷ Irham Fahmi, op.cit hlm. 13

³⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: LP-FEUI, 2005) hlm. 175

Jika tidak dikelola dengan baik pembiayaan beresalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Seperti menurut Firdaus dan Ariyanti, kegiatan menyalurkan kredit oleh bank mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha bank, likuiditas, profitabilitas, serta solvabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan kredit bank.³⁹ Dalam jumlah besar, pembiayaan beresalah akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut, ini dikarenakan menurunnya tingkat kepercayaan kreditur dalam menitipkan dananya dan akan berimbas pada perolehan laba bank.

Pengukuran pembiayaan beresalah ini menggunakan rasio NPF, yaitu rasio antara pembiayaan yang beresalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah, yang masuk dalam pembiayaan beresalah adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Penggolongan kualitas pembiayaan BPRS berdasarkan SE BI No. 13/11/DPBs dibedakan

³⁹ Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 43

berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu (1) Penggolongan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*; (2) Penggolongan kualitas pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *qardh*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah muntahiyyah bi tamlik* dan transaksi multijasa.

1. Penggolongan kualitas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

1) Lancar

1. Pembiayaan angsuran pokok belum jatuh tempo, atau tunggakan angsuran pokok belum melampui tiga bulan.
2. Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Prediksi Bagi Hasil (PBH) $\geq 80\%$.

2) Kurang Lancar

1. Tunggakan pembiayaan angsuran pokok telah melampui tiga bulan, namun belum melampui enam bulan.
2. Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Prediksi Bagi Hasil (PBH) lebih dari 30 % dan kurang dari 80%.

3) Diragukan

1. Tunggakan pembiayaan angsuran pokok telah malampui enam bulan, namun belum melampui dua belas bulan.
2. Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Prediksi Bagi Hasil (PBH) kurang dari 30 % selama tiga periode pembayaran

4) Macet

1. Tunggakan pembiayaan angsuran pokok telah malampui dua belas bulan.
2. Rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Prediksi Bagi Hasil (PBH) kurang dari 30 % selama tiga periode pembayaran.

2. Penggolongan kualitas pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *qardh*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *ijarah muntahiyyah bi tamlik* dan transaksi multijasa.

1) Lancar

1. Untuk pembiayaan non KPR, tidak terdapat tunggakan angsuran, atau tunggakan angsuran belum melampui tiga bulan.
2. Untuk pembiayaan KPR, tidak terdapat tunggakan angsuran, atau terdapat tunggakan angsuran belum melampui enam bulan.

2) Kurang Lancar

1. Untuk pembiayaan non KPR, tunggakan angsuran melampui tiga bulan, namun belum melampui enam bulan.
2. Untuk pembiayaan KPR, tunggakan angsuran melampui enam bulan namun belum melampui sembilan bulan.

3) Diragukan

1. Untuk pembiayaan non KPR, tunggakan angsuran melampui enam bulan, namun belum melampui dua belas bulan.
2. Untuk pembiayaan KPR, tunggakan angsuran melampui sembilan bulan namun belum melampui tiga puluh bulan.

4) Macet

1. Untuk pembiayaan KPR, tunggakan angsuran melampui dua belas bulan.
2. Untuk pembiayaan KPR, tunggakan angsuran melampui tiga puluh bulan.

Adapun kriteria penilaian kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE BI No 13/24/DPNP

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah selalu menjadi masalah yang cukup menyita perhatian, karena bila tidak dikelola dan ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin pembiayaan yang disalurkan kepada debitur yang seharusnya menjadi sumber perolehan laba bank akan berbalik menjadi sumber kerugian bank. Banyak faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Menurut Sutojo, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak bank melainkan debitur diantaranya:⁴⁰

⁴⁰ Edi Susilo, op.cit hlm. 314

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi.
- b. Adanya kesalahan dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan.
- c. Masalah pribadi debitur.
- d. Debitur memiliki banyak bidang usaha yang mengalami kegagalan sehingga berdampak pada bidang usaha lainnya.
- e. Kesalahan debitur dalam manajemen likuiditas di perusahaannya.
- f. Faktor diluar kendali debitur seperti bencana alam.
- g. Karakter yang buruk sehingga tidak ada kemauan untuk membayar angsuran pembiayaan.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak dari *Non Performing Financing (NPF)* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan akan berpengaruh buruk bagi profitabilitas⁴¹, selain itu, Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut juga berpengaruh pada:⁴²

⁴¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Edisi kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal. 82

⁴² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *op.cit* hlm.108

1. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor
6. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya
7. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan
8. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi dapat membahayakan sistem perbankan, maka ijin usaha dapat dicabut.

4. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Sektor Agraris

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang melekat ketika bank telah menyetujui untuk memberikan pembiayaan pada debitur hingga berakhirnya akad tersebut. Meski dengan menyalurkan pembiayaan bank

akan mendapat laba, namun apabila pembiayaan yang diberikan tidak dikelola dengan baik oleh debitur, maka akan menimbulkan kerugian pada bank itu sendiri, untuk itu bank harus selalu berhati-hati dalam memutuskan penyaluran pembiayaan.

Sebagai kegiatan utama, pembiayaan harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan banyak masalah sehingga berakibat kerugian pada bank *Non Performing Financing* (NPF) sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Karena semakin tinggi presentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan, hingga akhirnya akan berpengaruh terhadap keputusan dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak menimbulkan kerugian.⁴³

Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Nur Pribadi (2018) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan modal kerja dengan nilai koefisien β sebesar -0,0066 dengan probabilitas t-statistik sebesar

⁴³ Budhi Pamungkas dkk, “Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia”, Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember), 2018, hlm. 79

0,00.⁴⁴ Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Tamara Yuanita (2016) mengenai pengaruh NPF terhadap pembiayaan UKMM, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan sektor UMKM. Tingginya NPF menjadi indikator bahwa kualitas aktiva produktif bank semakin memburuk. Hal ini karena dana yang tertahan pada nasabah debitur yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya sehingga tidak dapat berputar ke nasabah yang lain, sehingga bank enggan dan lebih berhati-hati untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM.⁴⁵

H2: NPF berpengaruh negatif terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris pada BPRS di Indonesia

2.1.3.3. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga

⁴⁴ Akbar Nur Pribadi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia* (Bogor: Intitut Pertanian Bogor, 2018) hlm. 28

⁴⁵ Tamara Yuanita MM, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah untuk Sektor UMKM di Indonesia*, (Bogor: Intitut Pertanian Bogor, 2016), hlm 37

barang-barang lainnya.⁴⁶ Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi.⁴⁷

Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama (baik secara mutlak maupun persentasenya). Demikian pula waktu kenaikannya tidak perlu bersamaan. Yang penting adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu.⁴⁸

2. Penggolongan Inflasi

Menurut Paul A. Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut.⁴⁹

1. *Moderate Inflation*: kenaikan tingkat harga yang lambat umumnya disebut sebagai inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih

⁴⁶ Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 97

⁴⁷ Adiwarmanto A. Karim, loc.cit hlm. 135

⁴⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 25

⁴⁹ Adiwarmanto A. Karim, op.cit hlm 137

- mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada aset riil.
2. *Galloping Inflation*: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkat inflasi seperti ini orang hanya memegang uang seperlunya saja sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil “selamat” walaupun sistem harga berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung berinvestasi diluar negeri dari pada didalam negeri.
 3. *Hyper Inflation*: inflasi ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *galloping inflation*, akan

tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ini. Contohnya Wiemar Republik di Jerman pada tahun 1020-an.

3. Penyebab Inflasi

Inflasi dapat digolongkan karena penyebabnya yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*. *Natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk mencegahnya. *Human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.
2. *Actual/Anticipated/Expected Inflation* dan *Unanticipated/Unexpected/Inflation*. pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurang inflasi. Sedangkan *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
3. *Demand Pull Inflation* dan *Cosh Push Inflation*. *Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif. Dari barang dan jasa pada suatu

⁵⁰ Adiwarman A. Karim op.cit hlm. 138

perekonomian. *Cosh push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

4. *Spiraling Inflation* adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi sebelumnya terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan seterusnya.
5. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*. *Imported inflation* bisa dikatakan inflasi yang terjadi pada negara lain yang ikut dialami negara lainnya karena harus menjadi *price taker* dalam perdagangan internasional. *Domestic inflation* bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi didalam negeri yang hanya dialami suatu negara dan tidak begitu mempengaruhi negara lainnya.

4. Dampak Inflasi

Inflasi berpengaruh terhadap perbankan syariah di Indonesia pada dua kegiatan usaha utama perbankan syariah, yaitu dari sisi penghimpunan dana dan sisi penyaluran dana. Dari sisi penghimpunan dana, inflasi berpengaruh pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dimana kenaikan tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito di perbankan konvensional, tingginya suku bunga deposito ini lebih menarik dari pada bagi hasil di

perbankan syariah, dan akhirnya terjadi penurunan DPK pada perbankan syariah. Kedua dari sisi penyaluran dana khususnya dalam bentuk pembiayaan. Dalam dunia usaha, sebagai produsen barang dan jasa, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari biaya produksi. Namun bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen karna mengalami kerugian usaha, dan akhirnya akan berdampak pada perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan.⁵¹

Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsn bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).⁵²

⁵¹ Saekhu, “*Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia*” *Economica*, Vol. VI, edisi 1, 2015, hlm. 104

⁵² Muh Abdul Halim, “*Teori Ekonomi Makro*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 80-81

Inflasi akan menimbulkan berbagai dampak diantaranya:⁵³

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan dan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan inflasi kembali atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*)
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk kebutuhan non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*)
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.

⁵³ Adiwarmarman A. Karim, op.cit hlm. 139

4. Inflasi Menurut Islam

Ekonom Islam, Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M-1441 M), menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu: (1) *Natural Inflation*; dan *Human Error Inflation*.

1. *Natural Inflation*. Diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya (tidak bisa mencegah) ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif dan naiknya permintaan agregatif. *Natural inflation* dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan sebagai berikut:

a. Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak sehingga *net export* nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregatif. Hal semacam ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab r.a. pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barang dagangannya diluar negeri membeli barang-barang dari luar negeri yang lebih sedikit nilainya dari pada nilai barang-barang yang mereka jual. Sehingga keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli

masyarakat akan naik. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya permintaan agregatif dalam perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal.

- b. Akibat turunnya tingkat produksi karena paceklik, perang ataupun *boycott* yang mengakibatkan kelangkaan dan naiknya tingkat harga. Hal ini juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab yaitu pada saat paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum yang kemudian tingkat harga menjadi naik. Beliau melakukan impor gandum dari Fustat, Mesir untuk mengatasi kelangkaan gandum, sehingga penawaran agregatif barang kembali naik yang kemudian berakibat turunnya tingkat harga-harga.
2. *Human Error Inflation*. Dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri sesuai dengan QS Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia: Allah menghendaki agar mereka erasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia.⁵⁴ Seperti yang terjadi pada inflasi jenis ini. *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

- a) Korupsi dan administrasi yang buruk (*Corruption and Bad Administration*).
- b) Pajak yang berlebihan (*Excessive Tax*).
- c) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*Excessive Seignore*).

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid VII*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 513

5. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor

Agraris

Inflasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh perekonomian. Sampai dimana buruknya masalah ini berbeda diantara satu waktu ke waktu yang lain. (Sadono Sukirno, 2002. 302). Dalam jangka pendek inflasi bisa menguntungkan bagi produsen karena dapat menaikkan tingkat harga sehingga produsen akan meningkatkan produksinya. Menurut Soegiharso dan Gitaharie inflasi pada batas tingkat tertentu diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵⁵

Tidak selamanya inflasi terus berdampak negatif terhadap perekonomian, naiknya harga-harga secara wajar dan masih dalam batas tertentu, akan menaikkan semangat produksi, dalam hal ini lembaga keuangan dapat berperan untuk menyalurkan kredit/pembiayaan pada sektor produktif.

Hal ini juga berlaku pada industri sektor agraris, ketika harga gabah naik, maka banyak petani yang membutuhkan modal untuk kegiatan produksi pertaniannya. Hal ini menjadi kesempatan untuk perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaannya pada sektor agraris. Maka terjadinya inflasi akan

⁵⁵ Saekhu, op.cit hlm. 104

membuat nasabah lebih produktif, sehingga bank syariah semakin banyak untuk menyalurkan pembiayaannya.

Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurdin (2017) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Hal ini membuktikan meningkatnya inflasi dalam batas tertentu berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan *murabahah*. Hal ini menunjukkan inflasi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pembiayaan pada bank syariah pun meningkat.⁵⁶ Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Lita Istiani (2017) mengenai pengaruh inflasi terhadap pembiayaan UKM, menunjukan bahwa terjadinya inflasi masyarakat tetap melakukan pembiayaan untuk keperluan usahanya.⁵⁷

H3: Inflasi berpengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris pada BPRS di Indonesia

⁵⁶ Muhammad Nurdin, *Pengaruh Inflasi, NPF, DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode 3012-2017)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) hlm. 106

⁵⁷ Lita Istiani, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017). Hlm130

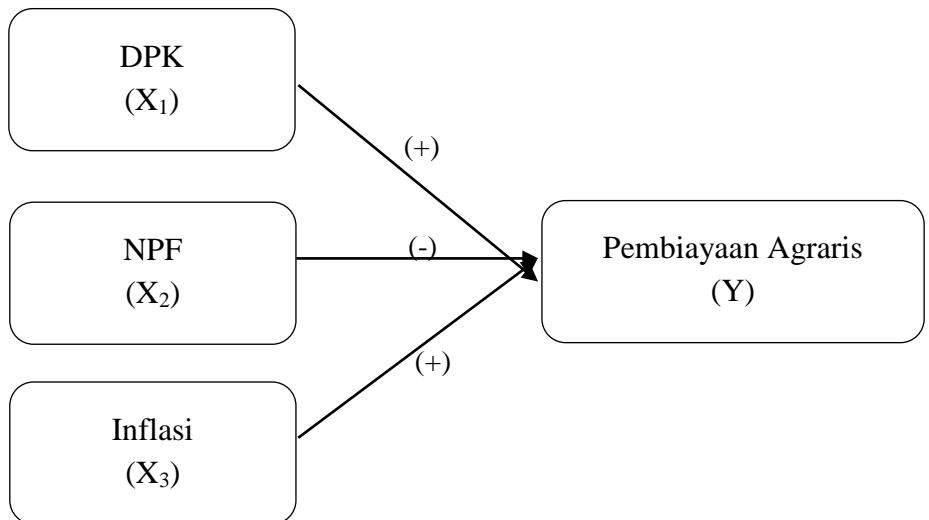
2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsika. Berdasarkan teori-teori tersebut selanjutnya dianalisis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen.⁵⁸

Dari tujuan penelitian dan kajian teori diatas, maka kerangka berpikir akan diuraikan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan inflasi terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris pada BPRS dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2

⁵⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandeung: Penerbit Alfabeta, 2013) hal. 88

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar diatas, penelitian ini ingin mengetahui tentang pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan inflasi terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan sektor agraris, sedangkan variabel independennya adalah dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan inflasi.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusa masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik⁵⁹

Hipotesis yang diberikan penulis pada penelitian ini adalah:

1. DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor agraris pada BPRS.
2. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan sektor agraris pada BPRS.

Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor agraris pada BPRS.

⁵⁹ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit hlm. 93

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian adalah suatu cara yang tepat untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian yang melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁶⁰

3.1.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yaitu DPK, NPF, Inflasi dan Pembiayaan pada BPRS seluruh Indonesia tahun 2016 hingga 2019.

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Karena data yang digunakan berupa angka serta penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan pengaruh antara variabel, DPK, NPF dan Inflasi terhadap Pemberian Pembiayaan.

Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berupa angka atau data yang diangkakan)⁶¹. Metode kuantitatif juga

⁶⁰ Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm.47

⁶¹ Saban Echdar, *op.cit* hlm.69

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁶²

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.⁶³

3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.2.1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (*independent*) dan satu variabel terikat (*dependent*).

1. Variabel Bebas. Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antedent* atau dalam bahasa indonesia sering disebut varabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11

⁶³ Saban Echdar, op.cit hlm.68

⁶⁴ Saban Echdar, op.cit hlm.211

menjadi sebab perubahannya variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu:

a. Dana Pihak Ketiga (X_1)

Dana Pihak Ketiga atau DPK adalah dana yang dihimpun dari masyarakat menggunakan berbagai instrumen yaitu giro, deposito dan tabungan. Namun dalam penelitian ini DPK yang dihimpun hanya dari instrumen deposito dan tabungan.

b. Pembiayaan Bermasalah (X_2)

Pembiayaan bermasalah timbul karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan yang telah diberikan bank. Terdapat tiga kualitas pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, pembiayaan dengan kualitas diragukan, dan pembiayaan macet.

c. Inflasi (X_3)

Inflasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh selama periode tertentu.

2. Variabel Terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel meliputi penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi variabel, indikator variabel dan skala variabel.

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

No	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
1.	Dana Pihak Ketiga	Dana yang dihimpun dari masyarakat melalui berbagai instrumen produk simpanan	Simpanan berupa Deposito dan Tabungan	Rasio
2.	NPF	Rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan jumlah pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan Kurang lancar, Diragukan, dan Macet	Rasio
3.	Inflasi	Rasio kenaikan tingkat harga selama satu periode tertentu	Tingkat inflasi tahun kalender gabungan 2016-2019	Rasio
4.	Pembiayaan	Pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit	Pemberian pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	rasio

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah data pembiayaan sektor agraris pada BPRS yang tercatat dalam statistik perbankan syariah sebanyak 36 data.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai numlah tertentu, maksudnya adalah sampel yang dimiliki harus dapat mewakili dari semua karakteristik dari populasi.⁶⁶ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik perbankan syariah Juli 2016 sampai Juni 2019.

⁶⁵ Sugiyono, op.cit hlm. 119

⁶⁶ Prof. Dr. Sugiyono, op.cit hlm. 116

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip yang kemudian dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.⁶⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada laporan keuangan statistik perbankan syariah periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2019 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2016 sampa dengan 2019.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian awal dari kegiatan penelitian dan pencatatan kejadian dari sebagian atau seluruh elemen populasi, pengumpulan data tersebut berkaitan dengan waktu, tenaga, biaya dan alat yang sehemat mungkin dapat dhimpun data yang lengkap, tepat dan terpercaya.⁶⁸

⁶⁷ Saban Echdar, op.cit hlm. 284

⁶⁸ Nila Kesumawati dkk, *Pengantar Statistika Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hal. 5

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid.⁶⁹

3.4.3. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan syariah, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber yang telah ada mengenai variabel penelitian. Data penelitian terdiri data tentang dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, inflasi serta pembiayaan agraris pada BPRS.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan program *spss*. Metode ini digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap suatu variabel dependen.

3.5.1. Uji Asumsi Klasik⁷⁰

Uji asumsi klasik merupakan pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linier yang bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam data, serta untuk menghindari kesalahan

⁶⁹ Saban Echdar, *op.cit* hlm. 287

⁷⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 101

spesifikasi model regresi yang digunakan. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linier sebagai berikut⁷¹(Latan&temalagi 2013:56):

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{6/N}}$$

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{24/N}}$$

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

⁷¹ Hengky Latan & Selva Temalagi, *Analisis Multivariate dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0 cet. 1*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 56

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut uji Durbin-Watson adalah:

Tabel 3.2
Pengukuran Autokorelasi

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, Aplikasi analisis multivariate

3. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedasitas.

Uji heteroskedasitas pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai variabel independen tidak signifikan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Dalam analisis regresi selain mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara dua variabel atau

lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.⁷²

Penulis menggunakan persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pemberian Pembiayaan
α	= Konstanta
X_1	= DPK
X_2	= NPF
X_3	= Inflasi
b_1, b_2 dan b_3	= Koefisien regresi variabel independen
e	= Standaer error/variabel pengganggu lain

3.5.3. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

⁷² Imam Ghozali, op.cit hlm. 93

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen⁷³.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji F menguji hipotesa bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara simultan sama dengan nol atau:

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$ artinya secara bersama sama DPK, NPF dan Inflasi tidak terdapat pengaruh terhadap pemberian pembiayaan.

$H_a : b_1, b_2, b_3 \neq 0$ artinya secara bersama sama DPK, NPF dan Inflasi terdapat pengaruh terhadap pemberian pembiayaan.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Berdasarkan signifikansi

- Jika signifikansi > 0.05 maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
- Jika signifikansi < 0.05 maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

⁷³ Imam Ghozali, op.cit hlm. 95

- b. Membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

$$F = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{(1-R^2)(N-K)}$$

Dimana:

R^2 = Nilai koefisien parsial

N = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Individual atau Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_1 = 0$ DPK tidak ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan

$H_a : b_1 \neq 0$ DPK ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan

$H_0 : b_2 = 0$	NPF tidak ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan
$H_a : b_2 \neq 0$	NPF ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan
$H_0 : b_3 = 0$	Inflasi tidak ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan
$H_a : b_3 \neq 0$	Inflasi tidak ada pengaruh signifikansi terhadap pemberian pembiayaan

Menghitung nilai t_{hitung} . Hipotesis parsial digunakan uji t maka dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Dimana:

t	= uji t
r	= Nilai koefisien korelasi
r^2	= Koefisien determinasi
n	= Jumlah sampel

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. BPR dapat dikatakan sebagai penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak terlepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan tersebut yang kemudian ditambah dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah di tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun kendalanya pada jangkauan BMI yang masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karena itu, BPRS diperlukan untuk menangani masalah keuangan /masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang belum terjangkau.

Sebagai langkah awal, ada tiga BPRS yang kemudian didirikan. Ketiga BPR syariah tersebut adalah:

1. PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
3. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung.

Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan *technical assistance* dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Marhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI.⁷⁴ Dari awal keberadaannya hingga sekarang BPRS telah berkembang sangat pesat.

Regulasi BPRS di Indonesia selanjutnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, seperti bentuk hukum BPRS yang disebutkan dalam Pasal 2 yaitu berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Modal disetor untuk mendirikan BPRS yang diabdikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 Pasal 4 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

⁷⁴<http://kasodik.blogspot.com/2017/10/makalah-bprs-bank-perkreditan-rakyat.html>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2019

- a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a;
- c. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut.

Pada pasal 9 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah dijelaskan bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh Pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. Pemerintah daerah; atau
- c. Dua pihak atau lebih sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Kegiatan usaha BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Simpanan yang berupa tabungan dengan berdasarkan akad *wadiah* dan investasi berupa deposito dengan akad *mudharabah*. Sedangkan dalam kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dan pengambilalihan utang. Selain menghimpun dan menyalurkan dana,

kegiatan usaha BPRS yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasiberdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

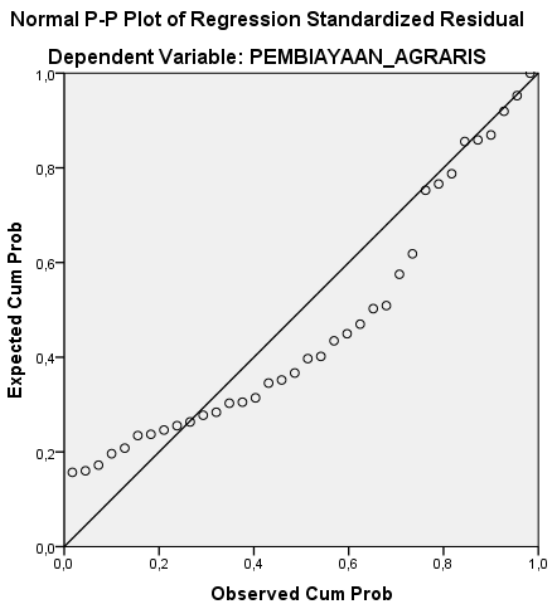
4.2. Analisis Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak, pada penelitian ini uji normalitas menggunakan P-P Plot dan uji statistik dengan menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pada grafik P-P Plot data dikatakan terdistribusi normal apabila titik titik menyebar disekitar garis diagonalnya, sedangkan pada uji Kolmogorov-Smirnov data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*. lebih besar dari taraf signifikansi yaitu $\alpha = 0.05$.

Gambar 4.1
Grafik P-P Plot



Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Dapat dilihat dari grafik P-P Plot diatas bahwa titik titik menyebar disekitar grafik diagonalnya. Jika dilihat sekilas maka terlihat data terdistribusi normal namun bisa saja secara statistik kebalikannya. Untuk lebih meyakinkan lagi dapat dilihat dari uji statistik Kolmogorov-Smirnov pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	16787,02214301
	Absolute	,185
Most Extreme Differences	Positive	,185
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		1,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,170

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Dari tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diatas diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0.170 > \alpha (0.05)$ yang berarti data terdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu masing masing variabel saling mempengaruhi. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Durbin – Watson (DW test).

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 ^a	,612	,575	17556,288	1,789

a. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 nilai dw sebesar 1.789, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, jumlah sampel (n) 36 dan variabel independen (k) 3. Sehingga didapatkan nilai batas bawah (dl) = 1.295 dan nilai batas atas (du) = 1.654, dilihat dari nilai dw yang lebih besar dari nilai batas atas namun kurang dari 2.346 (4-du) atau $du < dw < 4-du$ yaitu $1.654 < 1.789 < 2.346$, maka dapat dipastikan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini, uji heteroskedasitas menggunakan uji glejser. Indikasi terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai signifikansi pada variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	16520,169	34395,870		,480	,634
1	DPK	-,002	,002	-,130	-,649	,521
	NPF	1441,563	1961,580	,131	,735	,468
	INFLASI	-2428,775	4793,801	-,102	-,507	,616

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen nilai absolut. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji regresi.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	139808,465	52709,943		2,652	,012
	DPK	-,002	,004	-,056	-,442	,662
	NPF	17425,174	3006,023	,654	5,797	,000
	INFLASI	16304,404	7346,259	,283	2,219	,034

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Dari tabel 4.4 Diatas, maka persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$\text{Pembiayaan Agraris} = 139.808,465 - 0,002 \text{ DPK} + 17.425,174 \text{ NPF} + 16.304,404 \text{ Inflasi}$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 139.808,465025, artinya jika tidak ada nilai DPK, NPF dan Inflasi maka Pembiayaan Agraris tetap disalurkan sebesar 139.808.465.025
- b. Koefisien regresi DPK (X_1) sebesar $- 0,002$, artinya setiap kenaikan satu satuan DPK maka Pembiayaan Agraris akan mengalami penurunan sebesar 0,002 juga

sebaliknya, setiap penurunan satu satuan DPK maka akan meningkatkan Pembiayaan Agraris akan mengalami penurunan sebesar 0,002 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

- c. Koefisien regresi NPF (X_2) sebesar 17.425,174, artinya setiap kenaikan satu satuan NPF maka Pembiayaan Agraris akan mengalami kenaikan sebesar 17.425,174 juga sebaliknya, setiap penurunan satu satuan NPF maka Pembiayaan Agraris akan mengalami penurunan sebesar 17.425,174 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- d. Koefisien regresi Inflasi (X_3) sebesar 16.304,404, artinya setiap kenaikan satu satuan Inflasi maka Pembiayaan Agraris akan mengalami kenaikan sebesar 16.304,404 juga sebaliknya, setiap penurunan satu satuan Inflasi maka Pembiayaan Agraris akan mengalami penurunan sebesar 16.304,404 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.2.3. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.782 ^a	.612	.575	17556,288	1,789

a. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

R Square pada penelitian ini sebesar 0.575, artinya variabel Inflasi, NPF, DPK mampu menjelaskan variabel Pembiayaan Agraris sebesar 57.5% sedangkan sisanya yaitu 42.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian

2) Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan.⁷⁵ berikut adalah tabel hasil uji signifikansi simultan (uji F).

Tabel 4.6
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15531207641,699	3	5177069213,900	16,796	.000 ^b
Residual	9863143935,051	32	308223247,970		

⁷⁵ Agus Tri Basuki, op.cit .hal. 51

Total	25394351576,750	35			
-------	-----------------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

b. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 nilai signifikansi yang diperoleh dari uji F sebesar 0.000, nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. kemudian nilai f hitung sebesar $16,796 > 2.911$ (f tabel). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Pembiayaan agraris.

3) Uji Signifikansi Individual atau Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu.⁷⁶ Berikut adalah tabel hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	139808,465	52709,943		2,652	,012

⁷⁶ Agus Tri Basuki, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 52

DPK	-.002	,004	-.056	-.442	,662
NPF	17425,174	3006,023	,654	5,797	,000
INFLASI	16304,404	7346,259	,283	2,219	,034

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Sumber: output spss, data sekunder yang diolah (2019)

a. Pengujian Hipotesis Satu

Hasil analisis tabel 4.7 Menunjukkan variabel DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $-0,442 < 2,037$ (t Tabel) dan nilai probabilitas signifikansi DPK yang menunjukkan nilai sig sebesar $0,662 > \alpha (0,05)$, dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor agraris ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Dua

Variabel NPF pada hasil analisis uji t berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar $5,797 > 2,037$ (t Tabel) dan nilai probabilitas signifikansi NPF yang menunjukkan nilai sig sebesar $0,00 < \alpha (0,05)$ dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan sektor agraris ditolak.

c. Pengujian Hipotesis Tiga

Hasil uji t pada variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Dilihat dari nilai t hitung sebesar $2,219 > 2,037$ (t Tabel) dan nilai probabilitas signifikansi Inflasi yang menunjukkan nilai sig sebesar $0.034 < \alpha (0.05)$, dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan sektor agraris diterima.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Agraris

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien DPK sebesar -0,002 dengan t hitung -0,442 serta probabilitas signifikansinya 0,662. Dengan batas signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel 2,037 dengan demikian nilai t hitung $>$ t tabel. Maka disimpulkan DPK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Artinya meningkat atau menurunnya DPK, BPRS tetap menyalurkan menyalurkan pembiayaan sektor agraris.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, dimana jumlah DPK yang berhasil dihimpun akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Pertumbuhan setiap bank dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat. DPK

menjadi sumber dana utama yang paling diandalkan oleh BPRS dalam kegiatan operasionalnya termasuk dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS. Namun tidak mudah bagi BPRS untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor agraris begitu saja, penilaian tentang pembiayaan sektor agraris yang penuh resiko menjadi salah satu alasan BPRS sangat berhati hati untuk menyalurkan pembiayaannya pada sektor ini. Disisi lain, BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang lebih mudah dijangkau masyarakat di pedesaan, tetap menyalurkan pembiayaan sektor agraris untuk memunjang kebutuhan pertanian masyarakat di pedesaan.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azillah Thohari (2018), yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nuha Aji Setiawan dan Astiwi Indriani yang menyatakan variabel DPK berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan.

4.3.2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Agraris

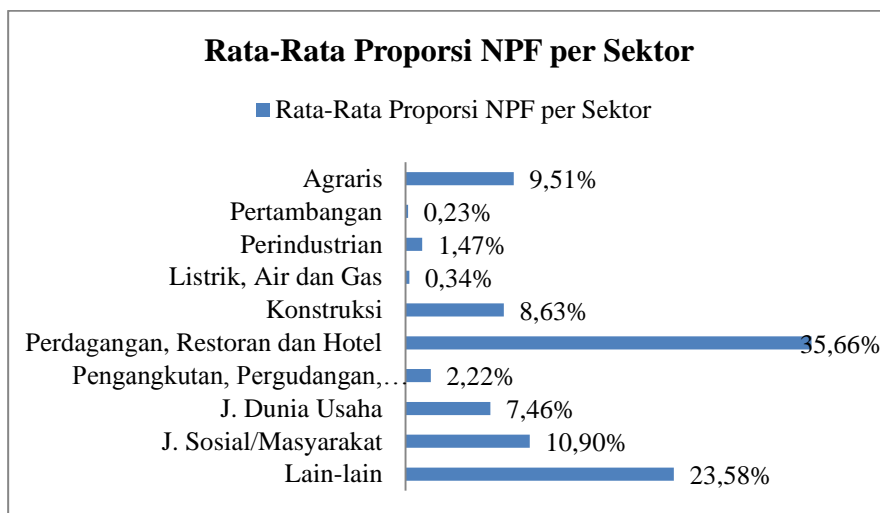
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien NPF sebesar 17.425 dengan t hitung 5,797 serta

probabilitas signifikansinya 0,000. Dengan batas signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel 2,037 dengan demikian nilai t hitung $>$ t tabel. Maka disimpulkan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Agraris.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori, dimana tingginya NPF berpengaruh dalam keputusan pemberian pembiayaan karena akan banyak kerugian yang harus ditanggung. NPF atau rasio pembiayaan bermasalah ini sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena semakin tinggi presentase NPF maka mengindikasikan buruknya kualitas pembiayaan yang disalurkan, hingga akan berpengaruh terhadap keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaanya.

NPF selalu menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan penyaluran pembiayaan. Namun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan sektor agraris. Hal ini dapat terjadi karena NPF pada BPRS tersebut didominasi pembiayaan bermasalah dari sektor ekonomi lain, sehingga untuk sektor agraris tetap dilakukan penyaluran pembiayaan.

Dapat dilihat dalam grafik 4.1 berikut.



Dari grafik 4.1 tersebut, NPF pada BPRS didominasi oleh NPF sektor ekonomi Perdagangan, Restoran dan Hotel yang mencapai 35,66% dan NPF sektor ekonomi lain-lain yang mencapai 23,58% dari seluruh NPF. Disisi lain, BPRS juga berperan dalam penunjang perekonomian di pedesaan sehingga pembiayaan sektor agraris yang merupakan pangsa pasar BPRS terus disalurkan, meski penyalurannya tidak sebanyak tahun tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Neil Al Muna (2013) dan Sri Lestari (2018) yang menyatakan bahwa variabel NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan agraris pada BPRS

4.3.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Agraris

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien Inflasi sebesar 16.304 dengan t hitung 2,219 serta probabilitas signifikansinya 0,034. Dengan batas signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel 2,037 dengan demikian nilai t hitung $>$ t tabel. Maka disimpulkan Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Meningkatnya inflasi, akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, begitu juga menurunnya inflasi akan menurunkan penyaluran pembiayaannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, dimana kenaikan inflasi akan meningkatkan pemberian pembiayaan.

Terjadinya inflasi, akan membuat masyarakat semakin giat bekerja dan lebih konsumtif hal ini menjadi kesempatan bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Tingginya gairah bekerja masyarakat menjadi kesempatan perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaannya terlebih pada sektor riil. Sesuai dengan penelitian ini bahwa meningkatnya inflasi akan mempengaruhi pertumbuhan penyaluran pembiayaan sektor agraris.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Nurdin (2017) dan Atika MA (2019) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan secara terhadap pembiayaan.

4.3.4. Pengaruh DPK, NPF, Inflasi Terhadap Pembiayaan Agraris

Hasil pengujian DPK, NPF dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Agraris. Ditunjukkan dari nilai signifikansi F sebesar 0.000 lebih kecil dari α (0.05). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neil Al Muna (2013), Indah Khoirun Nisa (2014) dan Sri Lestari (2018) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Sektor Agraris. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS tetap mempertimbangkan penyaluran pembiayaan sektor agraris meski dari tahun ketahun pembiayaan ini terus menurun.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda mengenai pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan inflasi terhadap pembiayaan sektor agraris maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan sektor Agraris. Setiap kenaikan atau penurunan DPK berpengaruh negatif namun sangat kecil terhadap penyaluran pembiayaan sektor agraris. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris tidak terbukti.
2. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor agraris. Setiap kenaikan NPF berpengaruh pada kenaikan penyaluran pembiayaan sektor agraris. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris tidak terbukti.
3. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor agraris. Setiap kenaikan Inflasi berpengaruh pada kenaikan

penyaluran pembiayaan sektor agraris. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan sektor agraris terbukti.

5.2. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan referensi dan masukan serta bahan pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk pihak BPRS
 - a. Lebih memperhatikan pembiayaan sektor agraris untuk meningkatkan proporsi pembiayaan agraris seiring dengan peningkatan jumlah DPK yang dihimpun.
 - b. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini sehingga BPRS dapat memanfaatkan dananya untuk mendorong sektor agraris.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Penelitian ini akan lebih baik jika memasukkan beberapa variabel yang mendukung penelitian seperti suku bunga atau tingkat profitabilitas bank.
 - b. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak manajemen bank atau nasabah debitur atau pihak yang berhubungan, sehingga menambah pemahaman dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ashari & Saptana. 2015. "*Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*". Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 23, No 2
- Atika. 2019. "*Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia (periode 2006-2016)*". Jurnal Akuntansi dan Publik, Vol. 10, No 1
- Beik, Irfan Syauqi dan Winda Nur Aprianti. 2013. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Sektor Pertanian Di Indonesia*" Jurnal Agro Ekonomi Volume 31. No. 1: 19-35
- Boediono. 1997. *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan Edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang disempurnakan) Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang disempurnakan) Jilid VII*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Fahmi, Irham. 2008. *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT. Alimni.
- Firdaus, Rachmat & Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Fitri, Maltuf. 2016. *Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jurnal *Economica*, Volume VII/Edisi 1.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Muh Abdul. 2018. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- <https://ojk.go.id/id/Default.aspx>
- <https://www.bps.go.id/>
- Istiani, Lita. 2017. *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah*, skripsi: UIN Raden Intan.
- Jannah, Ma'rifatul. 2018. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jumin, Hasan Basiri. 2014. *Dasar-Dasar Agronomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Karim, Adiwarmarman A. 2010. *Ekonomi Makro Ekonomi Islami*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Cetakan keduabelas,. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kesumawati, Nila, dkk. 2017. *Pengantar Statistika Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2010. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Latan, Hengky & Selva Temalagi. 2013 *Analisis Multivariate dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0 cet. 1*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, Sri. 2018. “*Analisis Pengaruh Fungsi Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia (2014-2016)*”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muna, Neil al. 2013. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*” Skripsi: S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nisa, Indah Khoirun. 2014. “*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia*” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Moneter Buku 2*. Yogyakarta: BPFE

- Nurdin, Muhammad. 2017. *Pengaruh Inflasi, NPF, DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode 3012-2017)*, (skripsi: UIN Syarif Hidayatullah
- Nurjaya, Endang. 2011. “*Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI NPF dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007- Maret 2011)*”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ovami, Debbi Chyntia & Ayu Thohari. 2018. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Performing Financing terhadap Pembiayaan Musyarakah*”. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 3. No.1.
- Pamungkas, Budhi dkk. 2018. “*Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol.6. No. 2.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Syariah Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Pibadi, Akbar Nur. 2018. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Modal Kerja Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*” Skripsi: Institut Pertanian Bogor.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Rifai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyadiana, Aam Slamet. 2009. *Mekanisme Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Saekhu. 2015. *Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia*. Jurnal Economica Vol. VI edisi 1.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: LP-FEUI.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Statistik Perbankan Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Jepara: UNISNUPRESS.
- Syarvina, Wahyu. 2018. “Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Syariah”. A-Tawassuth, Vol. III, No. 1.
- Tri Basuki, Agus. 2016. “Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis”. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*.
Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yuanita, Tamara. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pembiayaan Bank Umum Syariah untuk Sektor UMKM di
Indonesia*, skripsi: Intitut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN

Lampiran 1

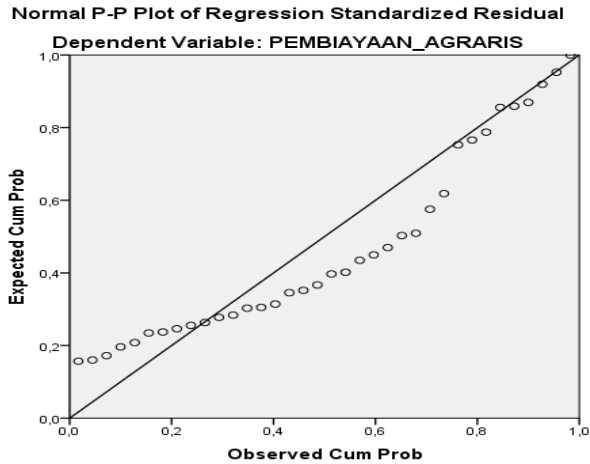
Data Jumlah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah (NPF), Inflasi dan Pembiayaan Sektor Agraris Juli 2016 – Juni 2019

No	Bulan	DPK (dalam jutaan)	NPF %	Inflasi %	Pembiayaan Agraris (dalam jutaan)
1	Jul-2016	5.281.377	9,97	3,71	385.236
2	Ags	5.451.955	10,99	3,00	383.409
3	Sept	5.435.445	10,47	3,24	354.256
4	Okt	5.509.530	10,49	3,16	347.776
5	Nov	5.669.456	10,13	3,49	346.384
6	Des	5.823.964	8,63	3,44	366.192
7	Jan-2017	5.897.239	9,61	4,58	372.817
8	Feb	5.999.577	9,98	3,84	379.379
9	Mar	6.019.516	9,94	3,59	361.949
10	Apr	6.143.791	10,15	3,70	385.963
11	Mei	6.113.523	10,63	4,00	399.006
12	Jun	6.042.107	10,71	4,30	372.514
13	Jul	6.268.626	10,78	3,83	369.617
14	Ags	6.387.759	10,77	3,54	366.388
15	Sept	6.486.741	10,79	3,74	368.297
16	Okt	6.562.411	10,90	3,62	365.614
17	Nov	6.718.910	10,81	3,81	364.439
18	Des	6.987.280	9,68	4,32	360.973
19	Jan-2018	7.105.191	10,60	3,75	368.213
20	Feb	7.148.155	11,21	3,30	368.352
21	Mar	7.242.954	10,98	3,33	369.158

22	Apr	7.273.665	11,56	3,23	377.803
23	Mei	7.149.497	11,55	3,34	389.278
24	Jun	7.165.907	11,78	3,72	377.560
25	Jul	7.485.582	11,80	3,41	376.236
26	Ags	7.597.800	11,75	3,08	446.501
27	Sept	7.739.373	11,60	2,95	380.878
28	Okt	7.751.935	11,35	3,41	377.785
29	Nov	7.977.272	10,40	3,40	377.606
30	Des	8.134.938	9,30	3,75	374.467
31	Jan-2019	8.103.396	8,40	2,80	307.209
32	Feb	8.082.299	9,02	2,40	311.961
33	Mar	8.135.985	8,71	2,59	318.461
34	Apr	8.030.510	8,80	2,92	318.853
35	Mei	7.958.806	8,70	3,16	323.106
36	Jun	8.099.759	8,83	3,03	328.677

Lampiran 2

Hasil Uji Normallitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	16787,02214301
	Absolute	,185
Most Extreme Differences	Positive	,185
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		1,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,170

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 3

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 ^a	,612	,575	17556,288	1,789

a. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Lampiran 4

Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16520,169	34395,870		,480	,634
	DPK	-,002	,002	-,130	-,649	,521
	NPF	1441,563	1961,580	,131	,735	,468
	INFLASI	-2428,775	4793,801	-,102	-,507	,616

a. Dependent Variable: AbsUt

Lampiran 5

Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	139808,465	52709,943		2,652	,012
DPK	-,002	,004	-,056	-,442	,662
NPF	17425,174	3006,023	,654	5,797	,000
INFLASI	16304,404	7346,259	,283	2,219	,034

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Lampiran 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,782 ^a	,612	,575	17556,288	1,789

a. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

Lampiran 7

Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15531207641,699	3	5177069213,900	16,796	,000 ^b
	Residual	9863143935,051	32	308223247,970		
	Total	25394351576,750	35			

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

b. Predictors: (Constant), INFLASI, NPF, DPK

Lampiran 8

Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	139808,465	52709,943		2,652	,012
	DPK	-,002	,004	-,056	-,442	,662
	NPF	17425,174	3006,023	,654	5,797	,000
	INFLASI	16304,404	7346,259	,283	2,219	,034

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN_AGRARIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Puspitaningtyas Sari Hadiyati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 06 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum. Pandana Merdeka L/13 RT 01 RW
03 Bringin, Ngaliyan Semarang
Email : 0697puspita@gmail.com
No.Telp. : 089655195430

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Ngaliyan 05 Tahun Lulus 2009
2. SMP Pondok Modern Selamat Tahun Lulus 2012
3. SMAN 6 Semarang Tahun Lulus 2015